

# Implementasi Dan Dampak Suatu Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Tingkatnya Pengangguran Di Kota Batam (Studi : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

Ayu Wulandari<sup>1</sup>, Timbul Dompok<sup>2</sup>, Etika Khairina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

[pb201010018@upbatam.ac.id](mailto:pb201010018@upbatam.ac.id)

## Abstract

Based on the article, it has been analyzed according to the results obtained from the journal on a problem that occurs in the implementation and impact on a government policy on the city of Batam. With the taking of a problem in Batam City, in order to immediately illustrate / think of what has happened to government policies in Batam City. Policy is a series or principle concept in which guidelines and plans for work can be implemented based on action or leadership. Based on the above policy, it can be exemplified against the title to be analyzed, namely the implementation and impact of government policies in overcoming the level of unemployment in Batam City. By determining this analysis so that a goal can be achieved. So from this analysis it is very interesting to discuss, because of these problems that have occurred in the city of Batam and from the Batam city government and Dipnaker are still confused to find a solution. In an impact of the implementation of this public policy, which is related to the unemployment rate in Batam City, there are many losses that occur to the community. Which is where people always complain to the Batam City Government regarding the difficulty of finding a job. So that a government policy has not been running as optimally as possible, because there are many obstacles to the local community that are needed on various indicators in the implementation process so that a goal is to make Batam City prosperous and can be implemented optimally and will not cause various debates between the community and the government.

**Keyword:** Unemployment, Policy, Implementation, Termination of Employment.

## Abstrak

Berdasarkan artikel ini, telah dianalisis berdasarkan hasil yang diperoleh dari jurnal tentang masalah yang terjadi dalam implementasi dan dampak pada kebijakan pemerintah di kota Batam. Dengan mengambil masalah di Batam City, untuk segera menggambarkan / memikirkan apa yang telah terjadi pada kebijakan pemerintah di batam city. Kebijakan adalah konsep serangkaian atau prinsip di mana pedoman dan rencana kerja dapat diterapkan berdasarkan tindakan atau kepemimpinan. Berdasarkan kebijakan di atas, dapat disimpulkan terhadap judul yang akan dianalisis, yaitu implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran di Batam City. Dengan menentukan analisis ini sehingga tujuan dapat dicapai. Jadi dari analisis ini sangat menarik untuk dibahas, karena masalah-masalah yang telah terjadi di kota Batam dan dari Pemerintah Kota Batam serta Dipnaker masih bingung untuk menemukan solusi. Dalam pengaruh implementasi kebijakan publik ini, yang terkait dengan tingkat pengangguran di Batam City, ada banyak kerugian yang terjadi pada masyarakat. Itulah di mana orang selalu mengeluh kepada Pemerintah Kota Batam tentang kesulitan menemukan pekerjaan. Jadi bahwa kebijakan pemerintah belum berjalan sebaik mungkin, karena ada banyak hambatan bagi masyarakat setempat yang dibutuhkan pada berbagai indikator dalam proses implementasi sehingga satu tujuan adalah membuat Kota Batam berkembang dan dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak akan menyebabkan berbagai debat antara masyarakat dan pemerintah.

**Kata kunci:** pengangguran, kebijakan, implementasi, penghentian kerja.

## 1. Pendahuluan

Kota batam adalah salah satu kota yang terkenal dengan suatu kawasan yang dimana

kawasan tersebut yaitu kawasan industri dan perdagangan yang penting untuk indonesia yang memiliki suatu tantangan unik terhadap

penanggulangan tingkatna pengangguran. Dengan begitu, pemerintahan kota batam atau dikenal dengan pemko batam telah memiliki suatu peran penting terhadap mengatasi masalah dalam pelaksanaan serta perumusan kebijakan ini. Disini, pada implementasi kebijakan yang efektif akan memberikan dampak suatu positif terhadap mengurangi suatu tingkat pengangguran serta meningkatkan juga kesejahteraan terhadap masyarakat di kota batam ini.

Disini, pengangguran merupakan suatu masalah ekonomi dan juga sosial yang dimana akan mempengaruhi terhadap stabilitas suatu pertumbuhan ekonomi daerah. Perlu kita ketahui, kota batam memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi terhadap suatu pekerjaan. Sehingga membuat masyarakat sulit untuk menangani suatu perekonomiannya masing-masing. Tingginya pengangguran dikota batam ini dikarenakan salah satunya sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak hanya itu saja, melainkan juga banyaknya suatu karyawan yang di PHK ( Pemutusan Hubungan Kerja ), banyaknya mahasiswa/siswa yang telah tamat dari pendidikan, serta banyaknya suatu karawan yang finish dari kontra dan banyaknya juga perusahaan yang tutup sehingga karyawan2 yang mengalami hal tersebut langsung sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

Dengan meningkatnya pengangguran tersebut, itu sangat tidak baik dalam suatu perekonomian. Yang dimana nantinya akan menyebabkan suatu konsekuensi negatif, seperti akan adanya suatu penurunan terhadap pendapatan individu, tingginya pada ketimpangan sosial, serta turunya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, sangat lah perlu suatu upaya terencana dan juga terarah untuk mengurangi tingkatnya pengangguran dan menciptakan suatu lapangan kerja yang lebih baik terhadap kota batam tersebut.

Implementasi kebijakan terhadap pemerintah ini merupakan suatu langkah yang kritis dalam menggapai suatu tujuan terhadap penanggulangan pengangguran. Untuk kebijakan yang baik perlulah didukung berdasarkan suatu rencana aksi yang konkret, sumberdaya yang memadai, serta efektifnya koordinasi terhadap pemerintah, sektor swasta, dan pemangkuan dari kepentingan lainnya. Tidak hanya itu saja, namun juga harus pertimbangan konteks sosial, ekonomi, serta kelembagaan kota batam agar bisa merancang suatu kebijakan yang tepat. Pada penanggulangan suatu tingkat pengangguran, ada kebijakan yang perlu di pertimbangkan agar kebijakan dapat

berjalan dengan baik, yaitu perlulah investasi pada pengembangan industri, tingkatnya kualitas terhadap tenaga kerja melalui suatu program pelatihan dan pendidikan, fasilitasi pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Dalam konteks penanggulangan tingkat pengangguran di Kota Batam, beberapa kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah investasi dalam pengembangan sektor industri, peningkatan kualifikasi tenaga kerja melalui program pelatihan dan pendidikan, fasilitasi pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah, dan peningkatan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada prinsipnya, pengangguran dikota batam masih dalam kategori memprihatinkan. Sebab bukan masalah seperti yang diatas, melainkan juga banyak nya pendatang yang dari luar namun masih belum mendapatkan pekerjaan yang disebabkan belum memiliki suatu kemampuan kompetensi lain. Sehingga meningkat lah pengangguran di kota batam ini. Seperti dalam data badan pusat statistik, ditahun 2020, pada tingkat pengangguran mencapai 11,79 %, dengan total 87.903 orang. Yang sudah berlangsung 3 tahun belakang. Pada per agustus 2022, tingkat pengangguran terbuka masih mencapai 9,56% . sehingga tingkat pengangguran di kota batam masih belum stabil. Meningkatnya pengangguran dikota batam ini, menurut rudi, yang paling banyak pengangguran itu mereka yang lulusan sma/smk, serta sarjana. Sedangkan disini yang sarjana ketika mereka lulus barulah mengadu nasib untuk mencari pekerjaan. Sementara, pada setiap perusahaan itu banya membutuhkan bagian operator, sehingga menjadi tidak seimbang untuk pencari kerja. Sedangkan yang tamatan lulusan sma/smk, itu masih kebanyakan belum memiliki skill nya masing-masing sehingga bagi perusahaan sulit untuk menerima pekerjaan tersebut.

Sedangkan disisi lain, pada ditahun dulu banyak perusahaan yang terkena dampak dari covid-19, yang dari 15.618 pekerja pun juga ikut terdampak, sehingga mengakibatkan pada pemotongan gaji, penundaan upah, dan terkenanya phk. Dengan terjadinya dampak tersebut, itu tidak hanya terjadi pada saat covit-19 aja, melainkan di akhir tahun-tahun ini dampak tersebut juga terjadi. Banyak dari beberapa perusahaan tutup, sehingga bagi para pekerja dikenakan phk. Tidak hanya itu saja, melainkan sekarang juga banyaknya suatu persyaratan lamaran

perusahaan yang tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan bagi anak yang tamatan sma/smk sulit mendapat pekerjaan yang disebabkan tidak adanya suatu pengalaman kerja. Karena itulah tingkat pengangguran dikota batam meningkat. Dengan begitu, pada suatu artikel ini akan dianalisis berdasarkan.

## 2. Kajian Teori

Berdasarkan dari kajian teori tersebut, disini dapat dijelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan ataupun langkah-langkah yang dimana pemerintah atau organisasi telah mengambilnya untuk mencapai suatu tujuan yang tercapai. Pada kebijakan ini, ada beberapa yang berkaitan pada kebijakan, yakni pada kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan sosial, dan lain-lainnya. Dengan begitu, pada konteks implementasi dan dampak kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tingkat pengangguran itu dapat dikaitkan dengan salah satu teori pasar tenaga kerja. Yang dimana, pada teori tersebut dapat dijelaskan bagaimana interaksi antar penawaran suatu tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Berdasarkan teori, ada beberapa faktor yang menjadikan tingkat pengangguran yakni seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, teknologi, kebijakan fiskal dan moneter, serta dinamika penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dengan begitu, tentunya pemko batam paham kenapa tingkat pengangguran dikota batam meninggi. Untuk itu, mungkin pemerintah bisa menggunakan salah satu kebijakan yang dapat mengurangi tingkat pengangguran seperti:

1. Kebijakan Stimulus Ekonomi: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan fiskal seperti peningkatan pengeluaran publik atau pemotongan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan tercipta lebih banyak peluang kerja.

2. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan: Pemerintah dapat menginvestasikan sumber daya dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja. Dengan meningkatnya kualifikasi tenaga kerja, mereka akan lebih siap untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja.

3. Kebijakan Dukungan dan Insentif Bisnis: Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru atau memperluas operasional mereka. Insentif ini dapat berupa

keringanan pajak, pembebasan biaya regulasi, atau bantuan keuangan.

4. Kebijakan Fleksibilitas Tenaga Kerja: Pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja, seperti pengurangan regulasi ketenagakerjaan yang berlebihan. Hal ini dapat mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja baru oleh perusahaan.

Dengan begitu, untuk tingkatnya pengangguran dikota batam bisa menurun secara sikit demi sedikit. Tidak hanya itu saja, pada implementasi kebijakan dalam penanggulangan pengangguran, penting untuk mempertimbangkan pada dampak suatu jangka pendek serta jangka panjang terhadap kebijakan tersebut. Sehingga nantinya, kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

## 3. Metode Analisis

Berdasarkan dari metode analisis ini, telah di analisis suatu tingkatnya pengangguran di kota batam yang membuat pemko batam serta dipnaker masih mencari apa penyebab dari permasalahan tersebut. Disini, pada pendekatan dari studi serta penulisannya yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yang dimana analisis ini, berdasarkan menurut sujarweni (2021:73), ada sumber data yang digunakan untuk analisis ini, yaitu adanya data sekunder.

Disini, data sekunder merupakan suatu data yang bersumber dari suatu jurnal, berita, buku, website, ataupun makalah yang dikumpulkan berdasarkan bentuk yang menjadi suatu jurnal analisis. Metode analisis deskriptif ini, dapat melakukan pemasaran kedalam suatu tulisan dan juga ucapan yang dapat diamati berdasarkan dari seseorang.

## 4. Hasil Dan Pembahasan

Pada suatu Implementasi kebijakan atau disebut juga dengan (Policy Implementation) ini merupakan suatu pelaksanaan yang dimana pengendali aksi-aksi kebijakan dalam suatu rentang pada waktu tertentu. Berdasarkan dari suatu analisis dalam sebuah penulis itu, akan nemfokuskan pada diri dalam menulis untuk melakukan pengelolaan sebuah implementasi serta dampak dari sebuah kebijakan dalam penanggulangan tingkatnya pengangguran di kota batam ini. Kebijakan Publik, Pada dasarnya telah diterapkan untuk memilih serta menunjukkan suatu pilihan penting dalam mempererat kehidupan, baik itu dari suatu lembaga organisasi, pemerintahan ataupun yang privat. Disini, kebijakan tidak pernah lepas dari adanya suatu bebas dari konotasi

serta nuansa yang dimana telah mencangkup dalam kata politis (political), yang sangat sering dipahami serta adanya mengandung makna keberpihakan dan menimbulkan akibat adanya kepentingan.

Disini, ada sebuah pengertian dari kebijakan, yang dimana Kebijakan juga merupakan suatu adanya sebuah ketetapan yang berlaku serta dicirikan oleh berbagai macam tindakan atau suatu perilaku yang dimana, dari konsisten hingga berulang, yang dapat membuatnya mampu srta menantinya (yang terkena kebijakan). Adapun disini yang menjadi acuan dalam pembahasan ini yaitu dimana telah terkait pada kebijakan publik (public policy) yang merupakan suatu rangkaian pilihan yang tepatnya lebih kurang dari saling berhubungan serta terikat (termasuk keputusan-keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh berdasarkan badan/lembaga serta pejabat maupun pemerintah (Soetari, 2018). Suatu Keberhasilannya implementasi kebijakan juga sangat membutuhkan keterlibatan stakeholders. Yang dimana, stakeholders disiu dapat dilakukannya secara demokratis serta partisipatif.

Disini stakeholders serta pembuatan kebijakan haruslah terus menerus terlibat pada dialog untuk menganalisis dari konsekuensi dan akibat adanya suatu permasalahan dalam suatu pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh sebab itu juga, pada evaluasi dari pelaksanaan kebijakan sangatlah diperlukan untuk melihat adanya akuntabilitas serta peningkatan pada suatu peningkatan kinerja dari suatu kebijakan publik (Ramdhani, 2016) Dalam suatu analisis ini si penulis akan melakukan suatu riset yang terkait dengan suatu permasalahan terhadap tingkatnya pengangguran di kota batam yang semakin sering terjadi. Pada suatu implementasi terhadap kebijakan publik yang dimana telah dilakukan pemerintahan kota batam dalam penanggulangan tingkatnya pengangguran di kota batam itu sudah dilakukan, namun tetap masih kurangnya ketegasan terhadap kebijakan pemerintahan tersebut. Sehingga semakin tinggi pada pengangguran tersebut. Disini, pada tingginya pengangguran kerja di kota batam dikarenakan juga bisa dari perselisihan kerja yang dimana mungkin terjadi pada setiap hubungan industri. Permasalahan tersebut telah terjadi ketika reformasi pemerintahan di indonesia. Yang dimana pada kasus perselisihan industrial juga semakin meningkat yang dimana nantinya akan menyebabkan tingginya pengangguran. Berdasarkan pada suatu pasal 11 ayat 22

undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan pada pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI), perselisihan hubungan industrial adalah suatu perbedaan pendapat yang dimana akan mengakibatkan suatu pertentangan antar perusahaan serta gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang disebabkan adanya perselisihan terhadap hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh terhadap satu perusahaan.

Disini, pada Perselisihan hubungan industrial merujuk pada ketegangan atau konflik antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau perusahaan. Perselisihan semacam itu dapat timbul dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kondisi kerja, hak-hak pekerja, upah, manajemen tenaga kerja, atau perselisihan lainnya di tempat kerja. Disini ada beberapa bagian yang mengenai perselisihan hubungan industrial, yakni :

#### **A. Perundingan Ketenagakerjaan**

Perselisihan hubungan industrial sering terjadi selama proses perundingan ketenagakerjaan antara serikat pekerja dan pengusaha. Ketika serikat pekerja mengajukan tuntutan atau perubahan pada kondisi kerja, gaji, atau manfaat lainnya, pengusaha mungkin tidak setuju atau menolak permintaan tersebut. Ini bisa menyebabkan ketegangan dan perselisihan.

#### **B. Upah dan Kompensasi**

Perselisihan hubungan industrial sering terjadi terkait dengan masalah upah dan kompensasi. Pekerja atau serikat pekerja dapat mengajukan tuntutan kenaikan gaji, tunjangan, atau manfaat tambahan. Jika pengusaha menolak atau tidak sepakat dengan tuntutan tersebut, perselisihan dapat terjadi, termasuk mogok kerja atau aksi protes lainnya.

#### **C. Kondisi Kerja dan Keselamatan**

Perselisihan hubungan industrial juga dapat muncul karena perbedaan pendapat tentang kondisi kerja dan keselamatan di tempat kerja. Pekerja atau serikat pekerja mungkin meminta perubahan atau perbaikan pada lingkungan kerja, peralatan keselamatan, atau kebijakan lain yang berpotensi memengaruhi kesejahteraan atau keselamatan mereka.

#### **D. Pelanggaran Hak Pekerja**

Perselisihan dapat timbul ketika hak-hak pekerja dilanggar oleh pengusaha. Ini termasuk pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan, diskriminasi, pelecehan di tempat kerja, atau pemecatan yang dianggap tidak adil. Serikat pekerja atau pekerja individu dapat memprotes atau mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja ini.

#### **E. Restrukturisasi atau PHK**

Perselisihan hubungan industrial dapat terjadi saat perusahaan melakukan restrukturisasi atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Serikat pekerja mungkin tidak setuju dengan alasan atau prosedur pemutusan tersebut dan dapat memprotes atau memperjuangkan hak-hak pekerja yang terkena dampak.

Untuk menangani perselisihan hubungan industrial, pihak-pihak yang terlibat sering kali menggunakan proses mediasi atau arbitrase untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian. Serikat pekerja juga dapat mengorganisir mogok kerja atau protes lain sebagai bentuk tekanan untuk mencapai tujuan mereka. Dengan begitu, disetiap negara tentunya ada peraturan hukum yang mengatur prosedur dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Supaya untuk tingkatnya suatu pengangguran tidak semakin naik.

#### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Tingkatnya Pengangguran**

Tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun siklus. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran, yakni :

##### **1) Pertumbuhan Ekonomi**

Tingkat pengangguran cenderung rendah saat ekonomi mengalami pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menciptakan peluang kerja baru dan mendorong perusahaan untuk merekrut lebih banyak pekerja. Sebaliknya, ketika ekonomi mengalami perlambatan atau resesi, perusahaan cenderung membatasi perekrutan dan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, yang dapat meningkatkan tingkat pengangguran.

##### **2) Permintaan Tenaga Kerja**

Permintaan tenaga kerja dari perusahaan dan industri juga mempengaruhi tingkat pengangguran. Jika ada permintaan yang kuat untuk pekerjaan dalam suatu sektor atau industri tertentu, maka tingkat

pengangguran cenderung rendah. Namun, jika ada penurunan permintaan atau perubahan dalam kebutuhan tenaga kerja, tingkat pengangguran dapat meningkat.

##### **3) Keterampilan dan Pendidikan**

Keterampilan dan tingkat pendidikan pekerja juga memainkan peran penting dalam tingkat pengangguran. Jika ada ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh pekerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, maka tingkat pengangguran dapat tinggi. Kurangnya keterampilan atau pendidikan yang relevan dapat menyulitkan pekerja untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat mereka. Tidak hanya itu saja, melainkan banyaknya juga suatu peraturan terhadap persyaratan kerja yang tidak sesuai porsinya, seperti tidak sesuai kondisi yang di lihat atau tidak sesuai karakter, sehingga para pencari sulit mendapatkan pekerjaan, dan mengakibatkan tingkatnya suatu pengangguran dikota batam.

##### **4) Faktor Demografis**

Faktor demografis, seperti pertumbuhan populasi, tingkat partisipasi tenaga kerja, dan perubahan struktur usia, juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Misalnya, jika jumlah lulusan baru yang masuk ke pasar tenaga kerja melebihi jumlah pekerjaan yang tersedia, maka tingkat pengangguran dapat meningkat.

##### **5) Kebijakan Pemerintah**

Kebijakan pemerintah terkait dengan pasar tenaga kerja, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan ketenagakerjaan, dan peraturan ketenagakerjaan, dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan peluang kerja dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran.

##### **6) Teknologi dan Otomatisasi**

Perkembangan teknologi dan otomasi juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kemajuan teknologi dapat menggantikan pekerjaan manusia dengan mesin atau perangkat otomatis, yang dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor.

##### **7) Kondisi Pasar Tenaga Kerja**

Faktor-faktor seperti fleksibilitas tenaga kerja, tingkat serikat pekerja, kebijakan imigrasi, dan tingkat perlindungan pekerja juga dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Peraturan ketenagakerjaan

yang ketat atau birokrasi yang rumit dapat menghambat perencanaan pekerja sulit untuk mendapatkan pekerjaan.

## **B. Penanggulangan Tingkatnya Pengangguran Di Kota Batam**

Pada Tingkat pengangguran di kota Batam, disini dapat ditangani melalui berbagai upaya dan kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan mendorong investasi. Berikut ada beberapa penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkatnya suatu pengangguran di kota batam, yakni :

### **1) Pengembangan Infrastruktur**

Pemerintah dapat fokus pada pengembangan infrastruktur di kota Batam, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur yang baik dapat menarik investasi dan memperluas sektor-sektor ekonomi yang ada, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru.

### **2) Pemberian Insentif Investasi**

Pemerintah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada perusahaan untuk berinvestasi di Batam. Ini dapat berupa insentif pajak, fasilitas pendukung, akses ke pasar, dan dukungan dalam hal perizinan dan regulasi. Dengan menarik investasi baru, akan ada peluang kerja yang lebih besar bagi penduduk setempat.

### **3) Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja**

Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Program pelatihan, kursus, atau pendidikan vokasional dapat disediakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan industri yang ada di Batam.

### **4) Diversifikasi Ekonomi**

Pemerintah dan pemangku kepentingan dapat berupaya untuk mendiversifikasi sektor ekonomi di Batam. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor non-manufaktur seperti pariwisata, layanan keuangan, teknologi informasi, atau logistik dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada industri manufaktur.

## **5) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Mendukung pengembangan dan pemberdayaan UKM dapat menjadi solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Pemerintah dapat memberikan pelatihan, pembiayaan, akses pasar, dan bantuan teknis kepada UKM agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja.

## **6) Kerja Sama dengan Industri Swasta**

Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta, termasuk perusahaan-perusahaan besar di Batam, untuk menciptakan program-program kerja sama yang berfokus pada peningkatan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

## **7) Promosi Pariwisata dan Investasi**

Mempromosikan potensi pariwisata Batam secara aktif dapat menarik kunjungan wisatawan dan mendorong investasi di sektor ini. Dengan pertumbuhan sektor pariwisata yang kuat, akan ada permintaan tenaga kerja yang lebih tinggi.

Dengan adanya suatu upaya di atas, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terus menerus terhadap pasar tenaga kerja di Batam.

## **C. Dampak Yang Terhadap Tingkatnya Pengangguran Di Kota Batam**

Tingkat pengangguran di kota Batam dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Berikut ada beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat tingkat pengangguran yang tinggi dikota Batam, yakni:

### **1) Kesejahteraan Ekonomi**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi pendapatan rumah tangga. Banyak individu dan keluarga mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

### **2) Peningkatan Kemiskinan**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak pada peningkatan kemiskinan di kota Batam. Individu yang menganggur memiliki akses terbatas terhadap pendapatan dan sumber daya, yang dapat menyebabkan penurunan standar hidup dan meningkatnya ketimpangan ekonomi.

### **3) Penurunan Konsumsi**

Ketika banyak orang mengalami pengangguran, daya beli mereka menurun. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan kesehatan sektor usaha.

#### **4) Ketenagakerjaan Migran**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mendorong orang untuk mencari pekerjaan di luar kota atau bahkan luar negeri. Hal ini dapat menghasilkan arus migrasi tenaga kerja yang tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di Batam dan memengaruhi dinamika ekonomi lokal.

#### **5) Perubahan Sosial**

Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Kurangnya peluang kerja dapat meningkatkan tingkat kejahatan, konflik sosial, dan ketidakpuasan masyarakat. Hal ini dapat berdampak negatif pada keamanan dan kohesi sosial di kota Batam.

#### **6) Peningkatan Ketergantungan pada Pemerintah**

Jika tingkat pengangguran tinggi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, banyak individu mungkin menjadi bergantung pada bantuan sosial atau program pemerintah lainnya. Hal ini dapat memberikan beban finansial pada pemerintah dan membatasi kemampuan mereka untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor pembangunan lainnya.

Untuk itu, dengan adanya suatu strategi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, dan diversifikasi ekonomi di Batam untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi dan mengurangi dampak negatifnya.

### **D. Respon Dan Kritik Terhadap Implementasi Dan Implikasi Kebijakan Terhadap Tingkatnya Pengangguran Di Kota Batam**

Respon dan kritik terhadap implementasi dan implikasi kebijakan terhadap tingkat pengangguran di kota Batam dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pemangku kepentingan yang terlibat. Dengan Efektivitas Kebijakan, Beberapa kritikus mungkin mempertanyakan efektivitas kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi tingkat pengangguran di Batam. Mereka mungkin meragukan apakah kebijakan

tersebut telah berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran dengan cara yang efektif. Sehingga pada Kesenjangan antara Kebutuhan Industri dan Keterampilan Tenaga Kerja Kritikus dapat berpendapat bahwa ada kesenjangan antara kebutuhan industri di Batam dengan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja lokal. Mereka mungkin menyatakan bahwa kebijakan dan program pelatihan yang ada belum cukup efektif dalam mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan.

Sehingga dengan adanya Dampak pada Industri Lokal, Beberapa pihak mungkin mengkritik bahwa kebijakan yang mendorong investasi asing di Batam dapat berdampak negatif pada industri lokal. Mereka berpendapat bahwa fokus pada industri manufaktur yang dikuasai oleh perusahaan asing dapat mengabaikan potensi pengembangan industri lokal yang lebih beragam. Dengan Perlindungan Tenaga Kerja, Kritikus mungkin berpendapat bahwa kebijakan yang mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi di Batam belum cukup memperhatikan perlindungan tenaga kerja. Mereka mungkin mengkritik kurangnya perlindungan dan kepastian kerja bagi pekerja, termasuk upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan hak-hak pekerja yang terjamin. Tidak hanya itu saja, Ketimpangan Ekonomi dan Sosial Respon terhadap kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor tertentu di Batam juga dapat mencerminkan kekhawatiran tentang ketimpangan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi.

Beberapa pihak mungkin mengkritik bahwa kebijakan yang hanya menguntungkan sektor-sektor tertentu dapat meningkatkan kesenjangan antara kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang terpinggirkan. Supaya ketika Dalam menghadapi respon dan kritik ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendengarkan dan merespons masukan dari berbagai pihak. Evaluasi terus menerus terhadap kebijakan yang ada, serta upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan, dapat membantu mengatasi kritik dan meningkatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Batam.

### **E. Simpulan**

Berdasarkan kesimpulan dari artikel diatas yaitu disini pada kebijakan

pemerintahan tepatnya di kota batam telah melaksanakan suatu kebijakan yang mengatasi tingkat pengangguran tersebut. dengan meningkatkan suatu keterampilan terhadap tenaga kerja, peningkatan suatu investasi, dan meningkatkan pembangunan suatu infrastruktur. Seperti contoh dari implementasi dan dampak suatu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan tingkat pengangguran di kota batam, yang dimana pada pemko batam haruslah tegas terhadap permasalahan ini. Karena, semakin majunya tahun, nantinya akan semakin banyaknya calon para pencari kerja yang ingin bekerja. Untuk itu, pada implementasi kebijakan pemerintah berilah dampak positif terhadap tingkat pengangguran di kota batam ini. Dengan tidak mempersulit para pencari kerja yang baru ataupun yang sudah menjadi karyawan.

#### **Daftar Pustaka**

- Angelina, W., Sunaidi, N., Sonata, V., Jackson, J., Jason, J., & Haryanto, H. (2023). ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BATAM TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 56-61.
- Rahmah, A. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Di Kota Batam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Rahmawati, S., Tan, B., Sunarwati, D., Farhan, M., & Lina, L. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT ANCAMAN PENGANGGURAN PASCA KENAIKAN INFLASI YANG TERJADI DI KOTA BATAM. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 206-213.
- Ningsih, D. (2017). DAMPAK KENAIKAN UPAH DI KOTA BATAM. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(1), 63-71.
- Siregar, D. L. (2019). Analisis Tingkat Pengangguraan Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 43-52.
- Habibi, F., & Hasanah, U. DAMPAK PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2022.
- Oktav P. Zamani. 2011. *Pedoman Hubungan Industrial*. Cetakan Ke-1. Jakarta Pusat : PPM Manajemen